

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tindakan Penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal fishing* di wilayah Indonesia dilakukan sesuai proses peradilan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dilakukan Penyidikan oleh Penyidik yang terdiri dari PNS Perikanan, TNI AL, POLISI hal ini dijelaskan dalam Pasal 73 ayat (1). Proses selanjutnya adalah penuntutan setelah itu pemeriksaan di persidangan. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku *illegal fishing* diatur dalam pasal 84 sampai Pasal 101. Yang mana pidana penjara paling lama 8 tahun penjara dan denda. Awak kapal dapat dipidana penjara dan atau di deportasi ke negara asalnya.
2. Indonesia mengambil tindakan tegas dalam dalam penegakan hukum di wilayah Perikanannya, berdasarkan pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dimana dapat melakukan tindakan peledakan atau penenggelaman sesuai dengan prosedur sistem peradilan yang berlaku dan tindakan ini dilakukan sebagai tindakan penjeraan kepada negara lain pelaku *illegal fishing* di Indonesia. Dan hal ini juga tidak bertentangan dengan *UNCLOS* karena didalamnya mengatur bahwa setiap

negara pantai mempunyai kedaulatan wilayah perairan, ini dijelaskan dalam pasal 2 *UNCLOS*. Maka dari itu Indonesia bebas menentukan kedaulatannya sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menindak tegas seluruh pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia tanpa melihat faktor-faktor tertentu seperti hubungan baik antara negara
2. Sebaiknya Pengadilan Perikanan dibentuk di tiap-tiap daerah di bawah Pengadilan Negeri di masing-masing daerah sehingga penanganan dapat lebih efektif terhadap tindak pidana perikanan

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Chairil. 1989. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, KHL 1982, Jakarta: Djambatan.
- Anwar, Khaidir. 2011. *Hukum Internasional II*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Brownlie, Ian. 1979. *Principles of Public International Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Budiyono, 2014. *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Danusaputro, Munadjat. 1984. *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarahnya*, Bandung: Binacipta.
- Gie, Liang. 1982. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang pengertian, kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 2001 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartono, M. Dimiyati. 1977. *Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Heryandi, 2013. *Hukum Laut Internasional*, Fakultas Hukum: Universitas Lampung.

- Ilmy, Umu. 2000. *Metodologi Penelitian dari Konsep Ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta.
- . 1986. *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta.
- Lantoranda, Akbar Surya. 2013. *Analisa Terhadap Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Marpaung, Leden. 1992. *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni.
- Muthalib, Abdul. 2011. *Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- . 2013. *Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Ghufuran, 2015. *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Nasution, Bahder Johan, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Neta, Yulia & M. Iwan Satriawan, 2013. *Ilmu Negara*, Bandar Lampung: PKKPU FH Universitas Lampung.

- Patriana, I Wayan. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1991. *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi & Soerjono Soekanto, 1979. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Alumni.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. "Survei dan Riset Untuk Sistem Peradilan Pidana Yang Lebih Rasional", *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Kedua, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Renhoran, Maimuna. 2013. *Strategi Penanganan IUU Fishing di Laut Arafura*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rokhimin, 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Pertama.
- Rudy, T. May. 2002. *Hukum Internasional 2*, Bandung: Refika Aditama.
- R. Agoes, Ety. 1991. *Konvensi Hukum Laut 1982: Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Bandung: Abardin.
- Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Siombo, Marhaeni. 2009. *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara 2008)*, Sinopsis Desertasi Program Pascasarjana, UNJ, Jakarta.
- Situmorang, Victor. 1987. *Sketsa Asas Hukum Laut*, Jakarta: Bina Aksara.
- Soehino, 1980. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Soedjono, Wiwoho. 1983. *Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya dengan Wawasan Nusantara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Soedjono & Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press.

----- . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

----- . 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Solihin, Akhmad. 2008. *Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Tesis, Universitas Padjadjaran Bandung.

Starke, J.G. 1992. *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Sinar Grafika: Jakarta.

----- . *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepluh, Jakarta: Sinar Grafika.

Subagyo, R. Joko. 1993. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Supriadi & Alimudin, 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*, Palu: Sinar Grafika.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Thontowi, Jawahir & Pranoto Iskandar, 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT Refika Aditama.

Warasih, Esmi. 2005. *Lembaga Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Utama, Semarang.

Wijayanti, Asri & Lilik Sofyan Achmad, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: CV Lubuk Agung.

Zulkifli & Jimmy, 2012. *Dictionary of Law*, Surabaya: Grahamedia Press.

B. sumber Perundang-Undangan

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF).

International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, Unregulated Fishing 2001 (IPOA-IUU Fishing).

Statuta Mahkamah Internasional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Tentang : Pengesahan *United Nations Convention On. The Law Of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/18/Men/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.16/Men/2010 tentang Pemberian Kewenangan SIPI dan SIKPI Untuk Kapal Perikanan Berukuran

Di Atas 30 (Tiga Puluh) *Gross Tonnage* Sampai Dengan 60 (Enam Puluh) *Gross Tonnage* Kepada Gubernur.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.50/Men/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Tahun 2012-2016.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

c. sumber lainnya

Badan Keamanan Laut RI, *Fungsi Bakamla*, dapat diakses di http://bakamla.go.id/home/tugas_fungsi. Lihat juga Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Berita online. *Ditenggelamkan Susi: Cara Kapal Thailand Mencuri*, 2015, dapat diakses di <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/02/09/090640966/ditenggelamkan-susi-cara-kapal-thailand-mencuri>.

Berita online. *Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan*, dapat diakses di <http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>.

Berita online. InternationalNews, *Media Thailand Protes Penenggelaman Kapal, Ini Reaksi RI*, dapat diakses di <http://international.sindonews.com/read/947375/40/media-thailand-protos-penenggelaman-kapal-ini-reaksi-ri1420625646>.

Berita online. *Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan Indonesia, Ini Reaksi Malaysia*, dapat diakses di <http://international.sindonews.com/read/948812/40/kapal-pencuri-ikan-ditenggelamkan-indonesia-ini-reaksi-malaysia1420884073>.

Berita online. *Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan*, dapat diakses di <http://luar-negeri.kompasiana.com/2014/12/02/kebijakan-penenggelaman-kapal-perlu-disosialisasikan-agar-tidak-ganggu-hubungan-dengan-negara-lain689833.html>.

Berita online. *Konsekuensi Penenggelaman Kapal*, dapat diakses di <http://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-14-18270847/1>.

Berita Online, *Menteri Susi Gregetan Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan Tanpa Pengadilan*, 8 Oktober 2015, dapat diakses di <http://news.detik.com/berita/3039341/menteri-susi-gregetan-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikantanpa-pengadilan>.

Berita online. *Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing*, dapat diakses di <http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susikerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>.

Berita online, *Penegakan Hukum Menurut Para Ahli*, dapat diakses di: <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Berita online. *Penenggelaman Kapal Asing*, dapat diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/14000081/Penenggelaman.Kapal.Asing>.

Berita online. *RI Harus Antisipasi Reaksi Keras Soal Penenggelaman Kapal*, dapat diakses di <http://wartaharian.net/berita/109-nasional/20189-ri-harusantisipasi-reaksi-keras-soal-penenggelaman-kapal.html>.

Berita online. *Sekilas Tentang Alam Indonesia*, dapat diakses di <http://www.travelindonesia.org/sekilas-tentang-alam-indonesia/>.

Berita online, Situs Berita dan Informasi Lingkungan, *Penenggelaman Kapal Asing, Bukti Indonesia Serius Perangi Illegal Fishing*, Oktober 2015, dapat diakses di <http://www.mongabay.co.id/2015/10/20/penenggelaman-kapal-asing-bukti-indonesia-serius-perangi-illegal-fishing/>.

Berita online. *Soal Kapal Asing, Vietnam Minta Indonesia Patuhi Hukum Internasional*, dapat diakses di <http://www.tribunnews.com/internasional/2014/12/12/soal-kapal-asing-vietnam-minta-indonesia-patuhi-hukuminternasional>.

Ejournal. 2011. *Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstens*, dapat diakses secara online di <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201207081310382587/15.pdf>.

FAO, Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Implementation of The International Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, *Fiat Panis*, 2012. Dapat diakses secara online di http://www.imcsnet.org/imcs/docs/implementation_ipoa.pdf.

FAO, *Pengelolaan Perikanan (Fisheries Management)*, Divisi Publikasi FAO PBB, Roma 1997, hlm. 7. Dapat diakses secara online di <http://www.fao.org/publications/en/>.

Jimly Asshiddiqie, Makalah, *Penegakan Hukum*, dapat diakses di http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *KKP Terbitkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing*, dapat diakses secara online di: <http://kkp.go.id/index.php/ars>.

----- . *KKP Terbitkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing*, dapat diakses secara online di http://kkp.go.id/index.php/arsip/c/9236/KKP-TERBITKANKEPMEN-PENANGGULANGAN-IUU-FISHING/?category_id=2.

Marudut Hutajulu, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik

Indonesia (Studi Putusan No:03/Pid.Sus.P/2012/Pn.Mdn)", *USU Law Journal*, Volume II Nomor I, Februari 2014, hlm.236. Dapat diakses secara online di <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=147257&val=4099&title=ANALISIS%20HUKUM%20PIDANA%20TERHADAP%20PENCURIAN%20IKAN%20DI%20ZONA%20EKONOMI%20EKSKLUSIF%20INDONESIA%20WILAYAH%20PENGELOLAAN%20PERIKANAN%20REPUBLIK%20INDONESIA%20%28STUDI%20PUTUSAN%20NO:%2003/PID.SUS.P/2012/PN.MDN>

Popi Tuhulele, Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (Antara Peluang dan Tantangan), *Jurnal Perspektif*, Volume 16 Nomor 3, 2011, ISSN : 1410-3648, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2011, hlm. 184. Dapat diakses secara online di http://ejournal.uwks.ac.id/my_files/201207081310382587/15.pdf.

Purwito Martosubroto, "Implementation of the Code of Conduct for Responsible Fisheries in the Marine Fisheries Sector, *Indonesian Journal of International Law*, Vol 2, Nomor 3, April 2005, Jakarta, hlm. 8. Dapat diakses di <http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/view/92>.

Pusat Riset Teknologi Kelautan Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen

Kelautan dan Perikanan, *Penggunaan VMS Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, dapat diakses di https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewkdXJAhVLkJKHTqGAAIQFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.openpaper.its.ac.id%2Fdownload.php%2F%3Fid%3D22&usg=AFQjCNEdKnP_CuHjSOp5iSrQXhiaoFOOIA&sig2=gVPqtXQJV2cM6LrM6kLk9g&bvm=bv.109910813,d.dGo.

Rokhmin Dahuri. *Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing.*, Majalah Samudera, Mei 2012, dapat diakses di <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-IUU-Fishing/>.

Susanto Masita, *Law Enforcement of Illegal Fishing In Arafura Sea*, dapat diakses di <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/3d820644ecf4698c467865141a42bcdc.pdf>.

Sekolah Tinggi Perikanan. *KKP Terbitkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing*, dapat diakses secara online di <http://www.stp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/860/KKP-Terbitkan-Kepmen-Penanggulangan-IUU-Fishing/>.

Usmawadi Amir. "Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case)", *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 12, Januari—April 2013, dapat diakses secara online di: <http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Penegakan%20Hukum%20IUU%20Fishing%20menurut%20UNCLOS%201982%20.pdf>.

Universitas Pembangunan Nasional, *Upaya Indonesia mengatasi Illegal Fishing ditingkat nasional*, dapat diakses secara online di:
[http://library.upnvj.ac.id /pdf/s1hi09/204613018/bab3.pdf](http://library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/204613018/bab3.pdf).